



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

CATATAN RAPAT
KOMISI X DPR RI

(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA, RISTEKDIKTI RI, BADAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)

Tahun Sidang	: 2015 – 2016.
Masa Persidangan ke-	: III (tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Dengar Pendapat Umum.
Dengan	: Komite Ad Hoc Reformasi PSSI.
Hari/Tanggal	: Senin, 22 Pebruari 2016.
Pukul	: 14.00 WIB - Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Teuku Riefky Harsya, M.T./Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Penyampaian masukan terkait dinamika dan situasi sepakbola Indonesia; 2. Dampak sanksi pembekuan PSSI terhadap Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games XVIII Tahun 2018.
Hadir	: 31 dari 55 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Komite Ad Hoc Reformasi PSSI	: Agum Gumelar/Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.50 WIB oleh Teuku Riefky Harsya, M.T./Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum sesuai Pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

II. CATATAN RAPAT.

A. PENYAMPAIAN MASUKAN TERKAIT DINAMIKA DAN SITUASI SEPAKBOLA NASIONAL.

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi Penjelasan dan langkah-langkah yang diambil oleh Komite Ad-hoc Reformasi PSSI untuk mengatasi pembekuan PSSI oleh sanksi FIFA.
2. Dalam rangka mengatasi pembekuan PSSI dan Sanksi FIFA, delegasi gabungan FIFA-AFC telah mengadakan pertemuan dengan Presiden RI pada tanggal 2 November 2015 dan menghasilkan beberapa poin sebagai berikut:

- a. Disepakati bahwa akan dibentuk Komite dibawah Statuta FIFA yang terdiri dari wakil-wakil para pemangku kepentingan sepakbola termasuk unsur Pemerintah. Komite inilah yang kemudian dibentuk dengan nama Komite Ad-hoc Reformasi PSSI.
 - b. FIFA, AFC dan PSSI berpandangan bahwa reformasi dan tanggung jawab sepakbola tidak dapat dilakukan oleh tim transisi yang dibentuk Pemerintah melainkan oleh FIFA. Akan tetapi FIFA, AFC dan PSSI bersedia bekerjasama dengan Pemerintah.
 - c. FIFA, AFC dan PSSI memiliki pandangan yang sama bahwa ada tindakan yang dapat dilakukan untuk melakukan reformasi sepakbola nasional, namun harus melalui FIFA sesuai ketentuan Statuta FIFA.
 - d. FIFA dan AFC tidak dapat membiarkan Pemerintah mengelola sepakbola nasional dalam bentuk mengambil alih asosiasi anggota PSSI.
 - e. Apabila Pemerintah tetap membekukan PSSI maka akan berdampak signifikan terhadap Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games XVIII tahun 2018.
3. Terhadap kondisi sepakbola nasional, Komite Ad-hoc Reformasi PSSI menyampaikan:
- a. Permasalahan pokok sepakbola nasional sehingga keluarnya sanksi FIFA terhadap PSSI adalah intervensi Pemerintah melalui SK Menpora Nomor 01307 tanggal 17 April 2015 yang mengintervensi kewenangan PSSI dalam melakukan proses verifikasi klub-klub profesional Indonesia yang berkompetisi di Indonesia Super League (ISL).
 - b. Tujuan jangka pendek Komite Ad-hoc Reformasi PSSI adalah menghindari sanksi FIFA yang lebih berat jika diputuskan pada kongres FIFA tanggal 26 Februari 2016.
 - c. Kerugian event internasional bagi sepakbola Indonesia akibat pembekuan PSSI dan Sanksi FIFA, antara lain tidak dapat ikut dalam event-event sebagai berikut: 1) Kualifikasi Piala Dunia tahun 2018; 2) Kualifikasi Piala Asia tahun 2019; 3) Kejuaraan sepakbola AFC U16 dan U19 tahun 2015; 3) Turnamen Sepakbola Wanita AFC U14 tahun 2015; 4) Turnamen Futsal Wanita AFC tahun 2015; 5) Kejuaraan futsal AFC tahun 2015; 6) Piala AFC tahun 2015; dan 7) program-program pengembangan kepelatihan dan wasit.
 - d. Event olahraga internasional yang masih mungkin terselamatkan jika pembekuan PSSI di cabut adalah; 1) Piala AFF Suzuki Cup November tahun 2016 di Filipina; 2) SEA Games tahun 2017 di Kuala Lumpur; dan 3) Asian Games XVIII tahun 2018 di Indonesia.
 - e. Dalam melaksanakan kinerjanya, Komite Ad-hoc Reformasi PSSI mengalami hambatan sebagai berikut:

- Wakil dari Pemerintah tidak pernah hadir atau bergabung dalam komite, sehingga menimbulkan kesulitan komunikasi dengan pihak Pemerintah.
 - Wakil Pemerintah menolak bergabung ke dalam Komite dan menawarkan persyaratan jika Pemerintah masuk dalam komite maka komite segera mempersiapkan Kongres Luar biasa (KLB) PSSI.
4. Mengingat pentingnya permasalahan tersebut serta masih adanya peluang solusi dicabutnya sanksi FIFA terhadap PSSI sebelum Kongres FIFA pada tanggal 26 Februari 2016, Komisi X DPR RI meminta Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI untuk segera melaporkannya langsung kepada Presiden RI.

B. DAMPAK SANKSI PEMBEKUAN PSSI TERHADAP INDONESIA SEBAGAI TUAN RUMAH ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018.

1. Komisi X DPR RI dan Komite Ad-hoc Reformasi PSSI berpandangan bahwa sanksi PSSI oleh FIFA beresiko terhadap dibatalkannya penunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games XVIII Tahun 2018.
2. Selanjutnya Komisi X DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis sebelum Kongres FIFA tanggal 26 Februari 2016.
3. Bahan rapat dan catatan RDPU yang disampaikan Komite Ad-hoc Reformasi PSSI pada hari ini, akan dijadikan bahan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 17.10 WIB.

KETUA RAPAT,



TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.